

newsletter

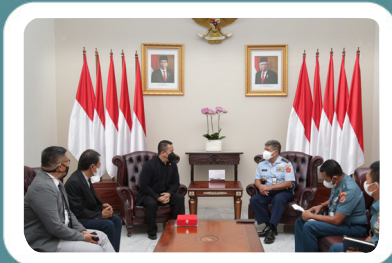
Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 151, Februari 2022



Plt. Gubernur Lemhannas RI: Pelantikan dan Pengangkatan Pejabat Merupakan Amanah



Menteri PANRB Menerima Audiensi Sestama Lemhannas RI



Audiensi Ikatan Arsitek Indonesia



Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas LKKL Tahun 2021 Dilaksanakan Secara Virtual

Daftar Isi

- 2 Menteri PANRB Menerima Audiensi Sestama Lemhannas RI
- 3 Kepala Biro Humas Lemhannas RI Mengenalkan Lemhannas RI Kepada Peserta PPRA 63
- 4 Audiensi Pemuda Demokrat Indonesia
- 5 Audiensi Ikatan Arsitek Indonesia
- 6 Audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional
- 7 Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lemhannas RI Tahun 2022
- 8 Pengukuhan Pengurus Senat PPRA 63
- 8 Audiensi Lemhannas RI dengan Bupati Aceh Barat
- 9 Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas LKKL Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual
- 10 Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lemhannas RI T.A. 2021
- 11 Sosialisasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran T.A. 2022
- 12 Plt. Gubernur Lemhannas RI: Pelantikan dan Pengangkatan Pejabat Merupakan Amanah

Tim Redaksi

Penanggung Jawab **A. Yudi Hartono**
Redaktur **Suparmo**
Penyunting/Editor **Endah Heliana**
Pembuat Artikel **Dwi Ariyani**
Penerjemah **Aidha Sahla Adiwidya**
Desain Grafis **Deannisa Savitri**
Fotografer **Angga Mitra Tama**
Sekretariat **Ni Made Vira Saraswati, Magista Dian Fitrilia, Cahyaqadri Hildamona Permatasari, Gatot, Maulida Arbaningsih**

Alamat Redaksi

Biro Humas Sestama Lemhannas RI,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10,
Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3832108, 3832109
Email humas.lemhannasri@gmail.com
Website <https://www.lemhannas.go.id>

Kamis, 6 Januari 2022



Menteri PANRB Menerima Audiensi Sestama Lemhannas RI

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. didampingi sejumlah pejabat Lemhannas RI datang beraudiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Kamis (6/1/22), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, S.H. menerima langsung kedatangan rombongan audiensi tersebut bertempat di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Turut hadir mendampingi Menteri PANRB dalam audiensi tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, S.H., MPM., Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Dr. Ir. Alex Denni, M.M., Staf Khusus Menteri PANRB bidang Penanganan Antikorupsi Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Penanganan Radikalisme Tony Surya Putra, serta Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.

Pada kesempatan tersebut Sestama Lemhannas RI didampingi

oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara, M.Si. dan Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Djoko Poerbo Hadijojo, M.Si.

Beberapa pejabat Lemhannas RI yang turut hadir adalah Direktur Pengkajian Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Brigjen Pol. Djoko Rudi E, S.H., S.I.K., M.Si., Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono S.Sos., M.M., M.Han., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Marsma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP., Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs Gusti Ketut Gunawa, M.M., CfrA., Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P., Kepala Bagian SDM Lemhannas RI Kolonel Mar. Dr. Budi Santoso, M.A.P., Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Lemhannas RI Kolonel Adm. Matheus Eko Herry Sulistyjo, serta Inspektur Pembantu Lemhannas RI Kolonel Cba (K) Silvi Mirna, S.Pt., M.M.

Kepala Biro Humas Lemhannas RI Mengenalkan Lemhannas RI Kepada Peserta PPRA 63

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. mewakili Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. memberikan pengenalan Lemhannas RI kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 pada Rabu (19/1/22), di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan tersebut, Kepala Biro Humas mengucapkan selamat datang dan bergabung menjadi peserta didik di Lemhannas RI. "Para peserta yang datang kesini adalah yang terbaik, merupakan yang terpilih, kalau kita sudah ada di Lemhannas RI pola pikir kita adalah tingkat nasional," ujar Kepala Biro Humas.

Hal tersebut sejalan dengan tugas utama yang diemban Lemhannas RI. Salah satu tugas utama Lemhannas RI

adalah menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal. Selanjutnya, Kepala Biro Humas menyampaikan bahwa Lemhannas RI bertugas menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI.

Kemudian, Lemhannas RI juga bertugas menyelenggarakan pematapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Nilai-Nilai Pancasila, serta Nilai-Nilai Kebhinneka Tunggal Ika-an. Kemudian Lemhannas RI juga memiliki tugas untuk membina dan mengembangkan

hubungan kerja sama dengan berbagai institusi terkait ketahanan nasional di dalam dan luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kepala Biro Humas juga menyampaikan sejarah, visi, misi, serta fungsi Lemhannas RI. Para peserta PPRA 63 juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait Lemhannas RI pada sesi tanya jawab.

Peserta PPRA 63 yang menjalani masa pendidikan selama tujuh bulan, berjumlah 100 orang berasal dari berbagai latar belakang, 7 peserta dari Lembaga Negara, 7 peserta dari kementerian, 4 peserta dari pemerintah provinsi, 6 peserta dari partai politik, 2 peserta dari DPRD, 9 peserta dari organisasi masyarakat, 3 peserta dari LLDIKTI, 4 peserta dari perseroan terbatas, 40 peserta dari TNI, dan 18 peserta dari POLRI.

Rabu, 19 Januari 2022



Audiensi Pemuda Demokrat Indonesia

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. menerima audiensi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia pada Senin (24/1/22) di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI. Hadir dalam audiensi tersebut Ketua DPP Pemuda Demokrat Indonesia Bahar Farawowan didampingi oleh anggota DPP Pemuda Demokrat Indonesia Agustin Nurul Fatimah, Fitriya Riza, Krisnawati, dan Khoirul Umar.

Ketua DPP Pemuda Demokrat Indonesia menjelaskan bahwa organisasi ini dibentuk pada 31 Mei 1947 oleh Presiden Soekarno. "Organisasi ini rohnya adalah nasionalisme dan kebangsaan," katanya. Sebagai organisasi yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu,

Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia merasa bertanggung jawab secara moril dalam merawat kebhinnekaan dan kebangsaan. Oleh karena itu, untuk bisa berdampak semakin luas, menurutnya anggota Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia perlu mengikuti program di Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan mengatakan bahwa output yang dihasilkan Lemhannas RI, yakni berupa Sumber daya manusia (SDM) dan kajian strategis. SDM tersebut dihasilkan dari pelaksanaan Program Pendidikan Reguler (PPR), Program Pendidikan Singkat (PPS), Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3D), Program Pelatihan Untuk Pelatih (PUP), dan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai Kbs). "Lemhannas RI membekali SDM itu

pada tataran yang bersesuaian pada kader pimpinan tingkat nasional," katanya.

Lebih lanjut, ia juga berpendapat hal-hal yang bisa disinergikan antara Lemhannas RI dengan Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia. Pertama, anggota Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia dapat mengikuti program di Lemhannas RI, misalnya Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Kedua, jika Organisasi Pemuda Demokrat Indonesia menyelenggarakan acara, dapat mengundang narasumber dari Lemhannas RI. Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP, dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.

Senin, 24 Januari 2022



Audiensi Ikatan Arsitek Indonesia

Plt. Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Wieko Syofyan menerima audiensi dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pada Senin (24/1/22) di Ruang Tamu, Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Umum IAI Ar. Georgius

Budi Yulianto, IAI, AA yang didampingi oleh Sekjen IAI Zakie Muttaqien, Wakil Sekjen IAI Larasati Wijaya, Ketua Bidang Hubungan Organisasi dan Kelembagaan Tiyok Prasetyoadi dan Ketua Bidang Mitra IAI Theresia Asri.

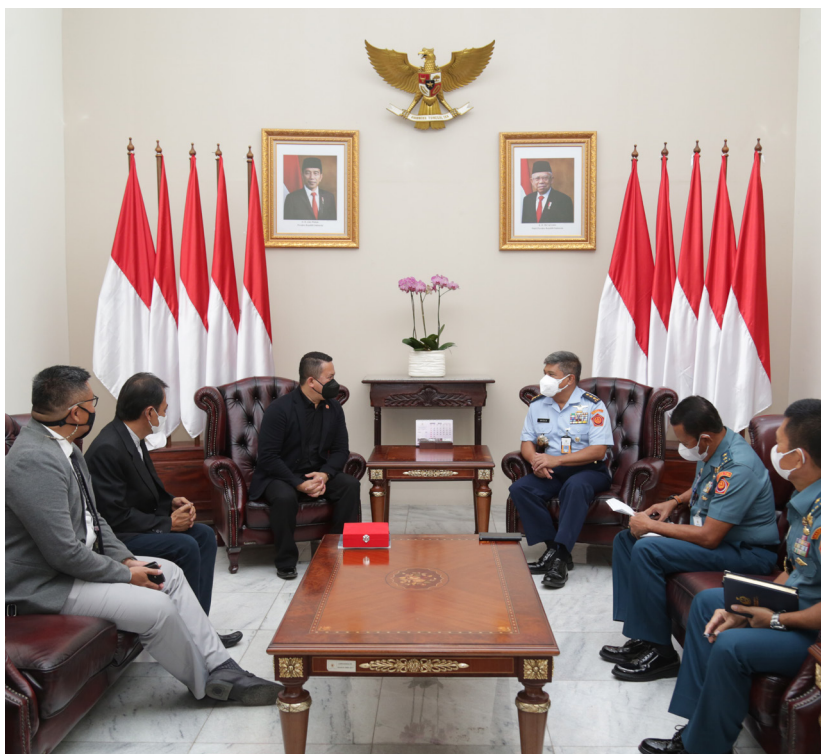
Ketua Umum IAI menjelaskan bahwa IAI yang berdiri sejak tahun 1959 di Bandung saat ini memiliki 22.800 anggota. Dengan jumlah anggota sebanyak itu, IAI merasa memerlukan satu kerja sama terkait dengan pelatihan wawasan kebangsaan. “Kami risau, terutama dalam sepuluh tahun terakhir, banyak (materi) wawasan kebangsaan yang tidak ada dalam kuliah,” ujar Ketua Umum IAI.

Mengingat hal tersebut, Ketua Umum IAI menyampaikan harapannya untuk membuat Nota Kesepahaman antara IAI dengan Lemhannas RI. Sehingga kelak anggota dan pengurus dari IAI bisa mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan maupun Pemantapan Nilai-nilai Pancasila.

Menyambut niat baik dari segenap pengurus IAI, Plt. Gubernur mengarahkan rencana kerja sama untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI. “Di lembaga ini, kita memang memiliki program-program Pemantapan Nilai-nilai yang kita programkan tiap tahunnya,” tuturnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP, dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.

Senin, 24 Januari 2022



Audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permasyarakatan Desa Nasional

Selasa, 25 Januari 2022



Rombongan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permasyarakatan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) melakukan audiensi kepada Plt. Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Wieko Syofyan Pada Selasa, (25/1/22) di Ruang Tamu, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS Deden Samsudin, S.H. yang didampingi Penasehat DPP ABPEDNAS Marsda TNI (Purn) Tumiyo, S.E. dan Dr. Taqwa Yunus, Bendahara Umum DPP ABPEDNAS Ella Nurlaela, serta Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS Indra Utama, M.Pwk., menjelaskan bahwa ABPEDNAS merupakan organisasi yang mewadahi anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS menyampaikan keinginannya untuk dapat bekerja sama dengan Lemhannas RI, baik dalam melibatkan Lemhannas RI pada kegiatan ABPEDNAS, maupun anggota

ABPEDNAS dapat mengikuti program di Lemhannas RI seperti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. "Kami berharap mungkin ada kesempatan program yang mungkin bisa dibuat bersama," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Gubernur mengungkapkan bahwa peluang kerja sama selalu terbuka luas, selama memenuhi kebijakan dan juga aturan-aturan yang berlaku di Lemhannas RI. "Saat ini memang Lemhannas RI yang bekerja sama dengan instansi lain dapat

dikatakan cukup banyak, kita tentunya akan melihat kemungkinan-kemungkinan, apakah memang kerja sama ini memungkinkan," tuturnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Diringbang Taplai Debidtaplaikbs Lemhannas RI Brigjen Pol Tjahyono Prawoto, S.H., M.M., Kepala Biro Kerma dan Hukum Settama Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP. dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.



Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lemhannas RI Tahun 2022

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si memimpin Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lemhannas RI tahun 2022 pada Rabu (26/1/22), secara daring.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama menyampaikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 akan segera dimulai. Hal tersebut didasari dengan terbitnya Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Lemhannas RI Tahun 2022 dan Surat Perintah Tim Reformasi untuk Masing-Masing Kedeputian dan Kesettamaan. “Marilah kita semua berkomitmen melaksanakan semua yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, untuk peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Lemhannas RI,” ungkapnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) T.A. 2021, menyusun Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2022, mengisi Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN), dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk para ASN. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi untuk setiap area perubahan dan unit kerja, Rencana Kerja untuk setiap agen perubahan yang telah ditunjuk, serta mempersiapkan pengajuan unit kerja sebagai zona integritas.

Selain itu, juga mempersiapkan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dimulai dari mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB untuk setiap area perubahan dan unit kerja serta menyiapkan data dukung yang kemudian dikirim ke Kementerian PANRB. Dalam beberapa bulan berikutnya, akan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sampai dengan persiapan evaluasi pada bulan September.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, menurut Sekretaris Utama, masih memiliki kekurangan dan hambatan yang membuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 berjalan kurang maksimal. Oleh karena itu, dalam

kesempatan tersebut, tiap-tiap koordinator bidang area perubahan dan unit kerja memaparkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hambatan yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi bersama. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal untuk peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lemhannas RI pada tahun 2022.

Sekretaris Utama Lemhannas RI juga menyoroti area akuntabilitas kinerja terkait dengan Rencana Strategis Lemhannas RI yang mendapatkan rekomendasi berulang selama dua tahun berturut-turut. “Mohon segera dibentuk tim dan menindaklanjuti dengan merevisi renstra, tentunya dengan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” kata Sekretaris Utama Lemhannas RI. Hal tersebut disoroti karena Rencana Strategis Lemhannas RI merupakan rujukan untuk Rencana Strategis Unit Kerja serta menjadi pedoman dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Pengukuhan Pengurus Senat PPRA 63

Plt. Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan memimpin Upacara Pengukuhan Pengurus Senat PPRA 63 Tahun 2022 Lemhannas RI pada Kamis (27/1/22) di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

“Keterpilihan saudara sekalian sebagai Pengurus Senat PPRA 63 haruslah disikapi dengan rasa syukur. Terpilihnya saudara-saudari sebagai

pengurus senat dapat meningkatkan koordinasi, baik antara peserta dan lembaga ataupun dalam lingkup internal peserta itu sendiri,” kata Plt. Gubernur saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut, Plt. Gubernur menekankan kepada seluruh Pengurus Senat PPRA 63 Lemhannas RI bahwa amanah dan kepercayaan yang diberikan, harus dijalankan dengan niat yang tulus, yang diarahkan untuk memberikan wadah

representasi bagi Peserta PPRA 63 baik itu dalam lingkup internal maupun eksternal. “Keberadaan para peserta dalam hubungan organisasi senat peserta akan menjadi proses belajar dan laboratorium bagi pembentukan watak kepemimpinan para peserta,” ujarnya.

Sementara dalam kepengurusan Senat PPRA 63, Plt. Gubernur berpendapat bahwa nantinya para peserta akan mengalami eksperimen sebagai pengikut dalam hubungan organisasi. Pengalaman tersebut akan menempatkan Peserta PPRA 63 pada proses pengambilan keputusan dan keadaan menghadapi keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi akan sering ditemui selama masa pendidikan. “Saya yakin, para Pengurus Senat yang telah terpilih, memiliki kemampuan dan latar belakang pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi dalam perannya berorganisasi untuk mengikuti proses kegiatan yang telah dirancang oleh lembaga ini,” pungkas Plt. Gubernur.

Kamis, 27 Januari 2022

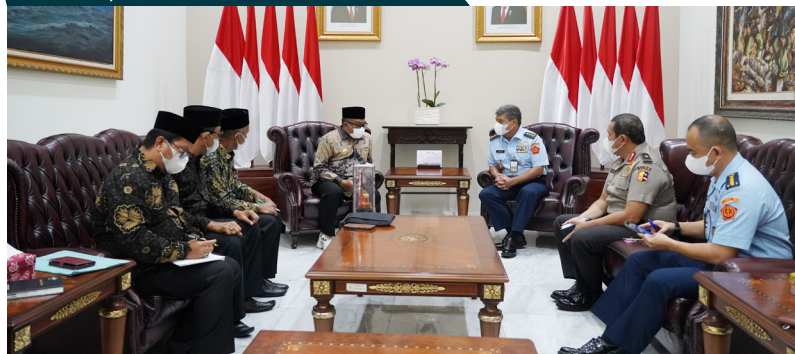


Audiensi Lemhannas RI dengan Bupati Aceh Barat

Plt. Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan menerima audiensi dari Bupati Aceh Barat H. Ramli M.S. didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban, S.E., Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Mawardi, S.H., Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Abdurrani, S.Pd., M.Pd. dan Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat Irsadi Aristora, M.H., pada Rabu (2/2/22) di Ruang Tamu, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Aceh Barat menilai bahwa Aceh barat perlu ada tuntunan agar Pancasila benar-benar dimiliki. Ia juga merasa penanaman nilai-nilai Pancasila semakin dibutuhkan di Aceh Barat. “Dalam hal ini kami ingin ada pendidikan para ulama-ulama yang dididik langsung oleh Lemhannas RI, membekali mereka untuk menjadi sokoguru,” ujarnya. Selain itu, Bupati Aceh Barat menyampaikan rencana Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI yang diikuti oleh para ulama dan guru-guru santri untuk kemudian akan menanamkan dan memantapkan ke masyarakat lain.

Rabu, 2 Februari 2022



Plt. Gubernur menyambut baik kehadiran Bupati Aceh Barat beserta rombongan. “Kita membuka diri dan kita apresiasi sekali rencana Bapak Bupati yang akan (berencana) mengadakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan,” katanya. Menurutnya, di Lemhannas RI ini adalah bagaimana kita semua memampukan diri untuk wawasan kebangsaan, salah satunya dari ideologi Pancasila. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Lemhannas RI berpedoman pada Empat Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Turut hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Plt. Gubernur, yakni Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Kedepuitan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Brigjen Pol Tjahyono Prawoto, S.H., M.M., Kepala Bagian Luar Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Kolonel Lek. Iwan Rudiwan, S.T., M.Sc., dan Kepala Bagian Penerangan Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Kolonel Arh. Alton Endarwanto Hadi Susanto, S.T., M.Si.

Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas LKKL Tahun 2021 dilaksanakan secara Virtual

Jumat, 4 Februari 2022



Plt. Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Wiekto Syofyan, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si, dan Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Gusti Ketut Gunawa, M.M., CfrA. menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 di Lingkungan AKN I pada Jumat (4/2/22) secara daring.

“Sebagai wujud nyata kami selaku Menteri Koordinator dan para Menteri, serta Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan anggaran Negara yang transparan dan akuntabel,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. pada kesempatan tersebut.

Lebih lanjut, Menko Polhukam menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 36 menuntut semua entitas untuk melakukan penerapan laporan keuangan berbasis aktual yang berarti bahwa laporan keuangan yang dibuat harus terukur dan dapat dievaluasi.

Oleh karena itu, guna menjamin kelancaran jalannya pemeriksaan, Menko Polhukam berharap kepada seluruh kepala Pimpinan Kementerian/Lembaga yang menjadi objek pemeriksaan agar membantu sepenuhnya pelaksanaan pemeriksaan BPK melalui kerja sama yang baik dengan menyediakan dokumen dan informasi yang menjadi lingkup pengujian.

“Agar tim pemeriksa dapat mengambil kesimpulan dan penilaian secara objektif, sehingga diakhir kegiatan tim nantinya dapat memberikan opini secara tepat terhadap sejauh mana Kementerian/Lembaga telah mengelola keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” pungkask Menko Polhukam.

“Dalam melakukan pemeriksaan, pertemuan entry meeting adalah salah satu tahap yang sangat penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran audit,” kata Pimpinan I BPK Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA. Lebih lanjut, Pimpinan I BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKKL Tahun 2021 mempunyai tujuan untuk memberikan opini atas laporan

keuangan masing Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan empat kriteria. Pertama, kesesuaian penyajian angka-angka dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan laporan keuangan. Keempat, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) baik rancangannya, maupun implementasinya.

Pimpinan I BPK berharap komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak yang berkaitan bisa berjalan dengan baik dan efektif. Komunikasi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai integritas, independensi, dan profesionalisme. “Kita perlu saling bersinergi dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan demi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Diharapkan pemeriksaan atas LKKL Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik, lancar, dan selesai tepat waktu. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan secara simbolis dari Pimpinan I BPK kepada Menko Polhukam.

Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lemhannas RI T.A. 2021

Selasa, 8 Februari 2022



Sebagai kelanjutan dari entry meeting yang dilakukan secara bersama dengan 20 Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan pada Jum'at (4/2/22) lalu, Lemhannas RI melaksanakan entry meeting pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021 pada Selasa (8/2/22) secara daring.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. menyampaikan bahwa seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI yang menjadi objek pemeriksaan agar membantu sepenuhnya pelaksanaan pemeriksaan BPK RI melalui kerja sama yang baik dengan menyediakan dokumen dan informasi. Hal tersebut, menurut Sekretaris Utama untuk menjamin kelancaran jalannya pemeriksaan BPK nanti.

Sestama juga mengimbau seluruh pihak untuk menyiapkan dokumen terkait

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran secara lengkap, cepat, dan komunikatif. Hal tersebut bertujuan agar tim pemeriksa dapat mengambil kesimpulan dan penilaian secara objektif kemudian dapat memberikan opini secara tepat terhadap sejauh mana Lemhannas RI telah mengelola keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Penanggung Jawab I BPK RI Hendra Gunawan, S.E., M.Si., Ak., C.A., ACPA., CSFA. mengapresiasi perkembangan opini Laporan Keuangan Lemhannas RI karena telah memperoleh opini WTP dalam 5 tahun berturut-turut. Diharapkan Lemhannas RI dapat mempertahankan hal tersebut dan kembali memperoleh opini WTP pada Laporan Keuangan T.A. 2021. "Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan selama 80 hari dan direncanakan penyampaian laporan hasil pemeriksaan akan dilakukan pada bulan Mei atau Juni 2022," katanya..



Terkait hal tersebut, Wakil Penanggung Jawab I BPK RI menyampaikan beberapa hal yang dinilai perlu menjadi perhatian. Pertama, terkait dengan informasi data dalam rangka perolehan dokumen untuk bisa menjadi bahan pemeriksaan. Kedua, komunikasi yang aktif dan efektif antara tim pemeriksa dan entitas dalam berbagai pilihan media komunikasi untuk mengurangi pertemuan fisik/kerumunan. Ketiga, penanggung jawab masing-masing satuan kerja dan pendamping dari APIP/Itjen dalam mendukung komunikasi dan koordinasi dengan tim pemeriksa. Keempat, disiplin protokol kesehatan dalam semua proses pemeriksaan.

Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran T.A. 2022

Rabu, 16 Februari 2022



Kepala Biro Perencanaan Settima Lemhannas RI Marsma TNI Heraldy Dumex Dharma, M.Si (Han) membuka Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Rabu (16/2/22) secara daring.

Kepala Biro Perencanaan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan yang memiliki peran penting dalam sebuah siklus anggaran. Oleh karenanya, pelaksana anggaran memiliki tugas mengeksekusi atas perencanaan setiap program dan/atau kegiatan yang telah disusun dan tertuang dalam DIPA. Terkait hal tersebut, setiap satuan kerja atau Kementerian/Lembaga perlu menyusun langkah-langkah awal agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan benar.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, unit kerja dapat terus memacu semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di unit kerja masing-masing,” ungkap Kepala Biro Perencanaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut dua narasumber, yakni Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta VI Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Zamruddin dan Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Tipe A1 Jakarta VI Arif Budiarto. Kedua narasumber tersebut menyampaikan langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan dalam upaya melaksanakan penyerapan anggaran agar berjalan dengan baik.

